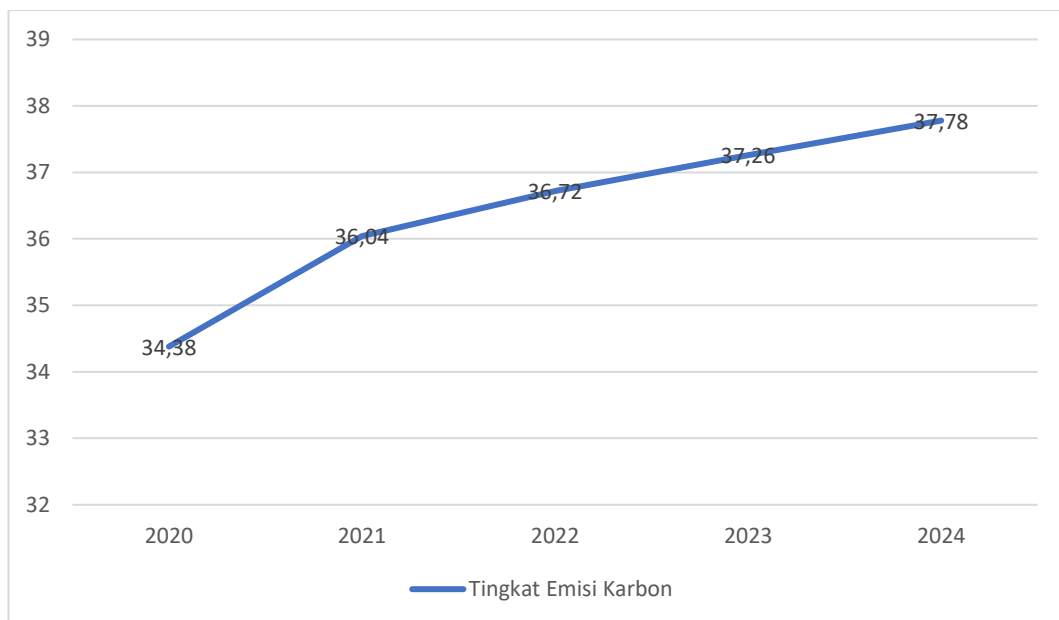


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global yang semakin mendesak dan memperoleh perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Peningkatan suhu bumi yang terjadi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer turut mempercepat kondisi tersebut, dengan karbon dioksida (CO_2) sebagai salah satu penyumbang terbesar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap perkembangan emisi karbon dari waktu ke waktu. Berikut disajikan data mengenai tingkat emisi karbon selama periode 2020–2024 :



Gambar 1.1 Tingkat Emisi Karbon Global

Sumber : data diolah oleh Statista

Berdasarkan data dari Statista (2025), hal tersebut menunjukkan bahwa setelah turun ke angka 34,38 miliar ton pada tahun 2020 akibat pandemi, emisi global justru melonjak drastis di tahun-tahun berikutnya. Angka tersebut mencapai 36,04 miliar ton di tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai rekor tertinggi sebesar 37,78 miliar ton pada tahun 2024. Lonjakan ini bahkan melampaui level emisi sebelum pandemi, menandakan bahwa pemulihan ekonomi global masih sangat bergantung pada aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk segera mencari solusi inovatif dan berkelanjutan guna mengatasi krisis iklim yang semakin nyata.

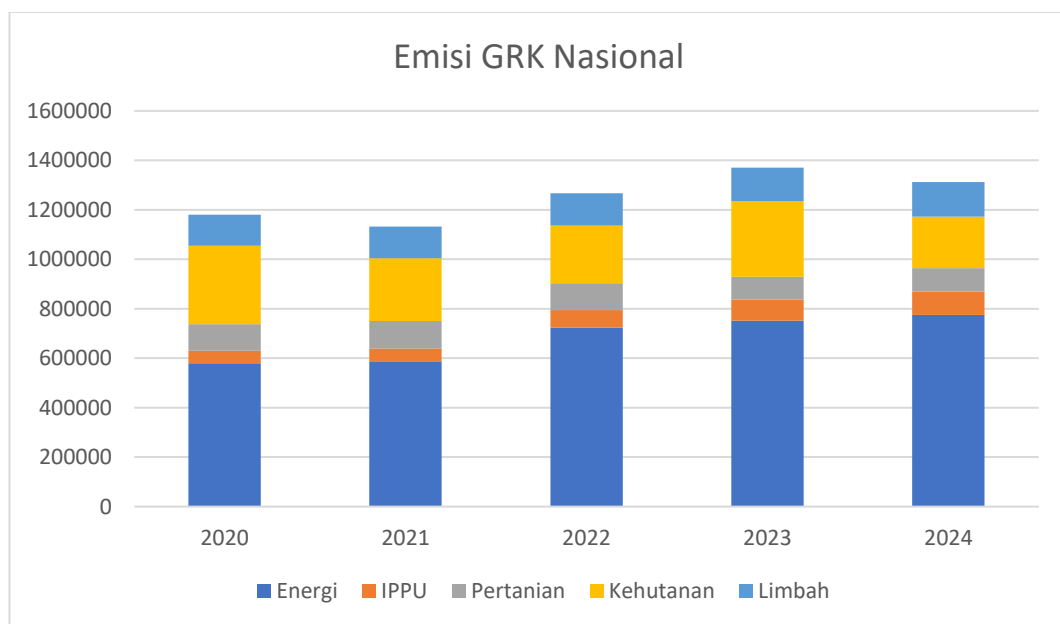
Peningkatan emisi karbon berdampak tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan saja, melainkan juga memengaruhi stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang (Nilasakti et al., 2024). Merespons ancaman tersebut, komunitas internasional telah membangun berbagai kerangka kerja dan komitmen global yang menekankan pentingnya pengendalian dan transparansi emisi karbon yang diterapkan di setiap perusahaan. Salah satu kesepakatan yang paling signifikan adalah *Paris Agreement* yang berada di bawah organisasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Perjanjian ini mendorong negara-negara untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C, serta mengusahakan pembatasan hingga 1,5°C dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Selain target penurunan emisi, *Paris Agreement* juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pelaporan, dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam memastikan komitmen negara dan pelaku usaha dapat dipantau secara kredibel (Astari et al., 2020).

Isu transparansi emisi karbon dalam dunia korporasi semakin memperoleh perhatian sebagai bagian dari agenda strategis perusahaan. Perusahaan menggunakan pengungkapan informasi mengenai emisi karbon untuk menunjukkan bentuk tanggung jawabnya terhadap lingkungan, memperoleh penerimaan sosial, serta memenuhi tuntutan berbagai pihak, termasuk investor, regulator, dan masyarakat. Perkembangan tersebut menjadikan pengungkapan emisi karbon tidak lagi terbatas pada tindakan sukarela perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Almaeda et al., 2023). Sektor energi memiliki posisi yang penting dalam perekonomian Indonesia karena sektor tersebut mendukung berbagai kegiatan industri dan aktivitas ekonomi. Namun, aktivitas sektor energi juga menghasilkan kontribusi yang besar terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan data mengenai perkembangan emisi melalui Laporan Inventarisasi GRK Nasional yang tercantum dalam dokumen *Biennial Transparency Report* kepada UNFCCC. Data tersebut menggambarkan kontribusi masing-masing sektor serta perkembangan emisi di Indonesia selama periode penelitian, yaitu 2020–2024. Rangkuman mengenai kondisi tersebut disajikan secara lebih rinci melalui Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 berikut :

Tabel 1.1 Profil Kontribusi Sektoral dan Tren Lonjakan Emisi GRK di Indonesia Periode 2020–2024

Sektor Utama	Kontribusi terhadap Total Emisi (%)	Volume Emisi 2020 (Juta Ton)	Volume Emisi 2024 (Juta Ton)	Lonjakan Emisi Sektoral
Energi	59,1%	580,1	774,7	+33,55%
LULUCF (Kehutanan)	16%	317,2	209,3	-34,02%
Limbah	10,6%	125,7	138,8	+10,40%
Industri	7,2%	49,9	94,9	+90,29%
Pertanian	7,1%	107,9	94,1	-12,76%

Sumber : Data diolah dari Publikasi BTR1 Ditjen PPI KLHK & Kementerian ESDM (2024)



Gambar 1.2 Tingkat Emisi Karbon Nasional

Sumber : Data diolah dari Publikasi BTR1 Ditjen PPI KLHK & Kementerian ESDM (2024)

Tabel 1.1 dan Gambar 1.2 mengungkap suatu fenomena yang sangat penting dalam data emisi pada akhir tahun 2024. Secara kumulatif, total emisi gas rumah

kaca (GRK) nasional Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan puncaknya di tahun 2023, yakni dari 1.370,4 juta ton menjadi 1.311,9 juta ton. Penurunan ini sepenuhnya disebabkan oleh keberhasilan menekan kebakaran hutan di sektor kehutanan/LULUCF, yang emisinya turun drastis dari 305,1 juta ton menjadi 209,3 juta ton. Sebaliknya, jika difokuskan pada sektor energi volume emisi justru terus meningkat secara konsisten dan tajam sepanjang periode pengamatan, dan tidak pernah mengalami penurunan. Emisi sektor energi melonjak dari 580,1 juta ton pada tahun 2020 menjadi 774,7 juta ton pada akhir tahun 2024, atau tumbuh sebesar 33,55%. Sektor energi kini mendominasi total emisi GRK nasional dengan porsi mencapai 59,1%. Fakta ini menegaskan bahwa emisi dari sektor energi paling sulit dikendalikan, karena tingginya ketergantungan operasional dunia usaha terhadap batu bara dan bahan bakar fosil.

Sektor energi memiliki cakupan yang luas, tidak hanya batubara tetapi juga minyak dan gas bumi (migas) serta energi terbarukan. Hal tersebut memiliki tantangan transparansi yang berbeda. Pada sub-sektor batubara, tantangan utama terletak pada emisi metana dari proses penambangan. Pada sub-sektor migas, isu *fugitive emissions* dan *flaring* menjadi sorotan, sementara pada energi terbarukan, tantangannya adalah membuktikan klaim keberlanjutan dan menghindari *greenwashing* (Camps, 2017). Tuntutan transparansi ini menghadapi tantangan besar karena struktur bauran energi nasional masih sangat bergantung pada sektor batu bara. Hal ini didukung oleh data dari EMBER Energy (2024) yang mengindikasikan adanya kesenjangan (*reporting gap*) antara emisi aktual dan emisi yang dilaporkan secara resmi, di mana estimasi emisi dari sektor batubara dapat

mencapai hingga delapan kali lipat lebih besar dari angka yang tercatat dalam laporan resmi. Kesenjangan ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan pelaporan emisi metana serta minimnya transparansi dari aktivitas pertambangan (Energy, 2024).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas dan kredibilitas pelaporan emisi karbon di Indonesia, khususnya pada sektor energi. Dengan adanya fenomena ini, Indonesia menghadapi tekanan yang semakin kuat untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan. Tekanan tersebut tidak hanya datang dari komunitas internasional, tetapi juga dari investor global dan lembaga keuangan yang kini mengintegrasikan kriteria lingkungan ke dalam keputusan investasi mereka. Pada konteks ini, perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada pada posisi yang paling rentan sekaligus strategis. Hal ini dikarenakan status mereka sebagai entitas publik menuntut tingkat keterbukaan informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-publik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan emisi karbon pada sektor energi dan pertambangan di Indonesia masih relatif rendah dan cenderung bersifat sukarela, sehingga belum mencerminkan transparansi yang memadai. Rendahnya keterbukaan ini berpotensi melemahkan legitimasi sosial perusahaan sekaligus menghambat pencapaian komitmen Indonesia terhadap UNFCCC. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor pendorong transparansi, seperti implementasi GCG, Media Exposure, serta Kinerja Lingkungan menjadi sangat krusial untuk dikaji lebih lanjut. Pengungkapan emisi karbon secara transparan menjadi suatu keharusan yang fundamental dalam upaya memperkuat

akuntabilitas serta mendukung keberlanjutan sektor pertambangan energi di Indonesia (Citra & Sastradipraja, 2025).

Kesenjangan pelaporan antara emisi aktual dan emisi yang dilaporkan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap legitimasi Indonesia di forum internasional seperti UNFCCC. Ketika data emisi nasional yang disusun berdasarkan laporan perusahaan dipertanyakan kredibilitasnya, kepercayaan pemangku kepentingan global terhadap keseriusan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim turut melemah (Majidah et al., 2025). Di tingkat korporasi, rendahnya transparansi emisi karbon berpotensi memicu krisis legitimasi bagi Perusahaan sektor energi. Ketika perusahaan tidak mengungkapkan informasi emisi secara memadai, publik dan investor dapat menilai bahwa perusahaan berupaya menyembunyikan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Hal ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga menimbulkan skeptisisme terhadap komitmen lingkungan yang selama ini diklaim, baik oleh korporasi maupun pemerintah sebagai regulator (Nilasakti et al., 2024).

Krisis legitimasi tersebut semakin diperkuat oleh peran media massa sebagai mekanisme pengawasan sosial. Sorotan publik terhadap perusahaan sektor energi dapat meningkat akibat pemberitaan media mengenai praktik lingkungan yang buruk, seperti pengabaian emisi metana, sehingga berpotensi membentuk persepsi negatif yang mengancam legitimasi Perusahaan (Wardana et al., 2022). Rendahnya tingkat transparansi ini menjadi indikasi adanya problematika dalam tata kelola perusahaan, di mana mekanisme internal belum dioptimalkan secara

maksimal sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan kontrak sosial korporasi dengan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengevaluasi kembali komitmen tata kelola internal serta respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan luar (Ardillah et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji determinan transparansi emisi karbon masih meninggalkan sejumlah kesenjangan. Pertama, dari aspek metodologis, masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan faktor GCG, *media exposure*, dan kinerja lingkungan dalam satu model empiris secara simultan, khususnya pada konteks perusahaan sektor energi di Indonesia. Kedua, pengukuran transparansi emisi karbon yang digunakan seringkali masih bersifat umum, sehingga hasilnya sulit untuk diperbandingkan antarperusahaan (Andrian & Kevin, 2021a). Ketiga, periode pengamatan pada studi-studi sebelumnya dinilai belum merefleksikan dinamika terbaru pasca meningkatnya tekanan global terhadap isu perubahan iklim (Fajriati & Hapsari, 2026a).

Selain faktor GCG, *Media Exposure*, dan Kinerja Lingkungan, keputusan strategis perusahaan dalam melakukan transparansi emisi karbon secara inheren juga dipengaruhi oleh karakteristik struktural dan kapasitas finansial internal masing-masing entitas (Fajriati & Hapsari, 2026a). Karakteristik seperti ukuran perusahaan (*firm size*) dan umur perusahaan (*firm age*) merepresentasikan skala operasional, kematangan organisasi, serta tingkat visibilitas publik yang dihadapi entitas, di mana perusahaan yang lebih besar dan mapan cenderung berada di bawah sorotan publik yang lebih masif sehingga memiliki dorongan lebih kuat untuk menjaga legitimasi sosialnya. Sementara itu, faktor finansial seperti tingkat

leverage (struktur utang) dan kinerja keuangan (*profitability*) mencerminkan kemampuan ekonomi korporasi dalam menanggung biaya operasional pelaporan keberlanjutan yang kompleks. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki keleluasaan sumber daya untuk mendanai sistem akuntansi lingkungan, sedangkan tingkat utang yang tinggi dapat membatasi atau justru memicu keterbukaan guna meyakinkan para penyedia modal (Citra & Sastradipraja, 2025).

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Media Exposure*, dan Kinerja Lingkungan terhadap Transparansi Emisi Karbon. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024 sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan standar global *GRI 305: Emissions* sebagai dasar pengukuran tingkat Transparansi Emisi Karbon. Penggunaan standar tersebut memungkinkan penelitian ini memperoleh ukuran transparansi yang lebih terstruktur dan relevan dengan aspek pengungkapan emisi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Transparansi Emisi Karbon pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Transparansi Emisi Karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?

2. Apakah *Media Exposure* berpengaruh terhadap Transparansi Emisi Karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Transparansi Emisi Karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap transparansi emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Menguji pengaruh *Media Exposure* terhadap transparansi emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Menguji pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap transparansi emisi karbon pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara operasional maupun akademis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Operasional (Praktis)

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan evaluatif bagi perusahaan sektor energi untuk mengukur penerapan GCG, pengelolaan kinerja lingkungan,

dan respons terhadap tekanan media berkontribusi terhadap terwujudnya transparansi emisi karbon. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai perumusan kebijakan internal yang lebih akuntabel dan sesuai dengan standar pelaporan, guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual transparansi emisi karbon di sektor energi. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan pelaporan keberlanjutan yang lebih ketat dan terstandarisasi, khususnya terkait pengungkapan emisi karbon bagi perusahaan publik.

3. Bagi Investor dan Masyarakat

Penelitian ini menyediakan informasi mengenai komitmen lingkungan dan tingkat keterbukaan perusahaan sektor energi. Informasi ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel.

1.4.2 Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi, terutama dalam bidang akuntansi

lingkungan dan akuntansi keberlanjutan. Penelitian ini secara khusus mengkaji kembali relevansi teori legitimasi dalam menjelaskan praktik pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan informasi terkait lingkungan sebagai upaya untuk memperoleh dan mempertahankan penerimaan dari masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menguji pengaruh GCG, *Media Exposure*, dan Kinerja Lingkungan secara simultan dalam menjelaskan tingkat Transparansi Emisi Karbon pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan teori legitimasi dalam menjelaskan praktik transparansi emisi karbon pada konteks perusahaan di Indonesia.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan gambaran terbaru mengenai praktik transparansi emisi karbon di sektor energi Indonesia periode 2020-2024. Periode ini dipilih karena merupakan masa di mana isu perubahan iklim dan tuntutan transparansi semakin menguat pasca *Paris Agreement*. Sektor energi sendiri merupakan sektor yang paling berkontribusi terhadap emisi nasional, tetapi masih jarang diteliti secara mendalam terkait transparansi emisinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian berikutnya yang hendak menginvestigasi faktor-faktor lain, contohnya tekanan dari investor asing maupun kebijakan pemerintah, yang belum dikaji dalam penelitian ini.